



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI –
PARLEMEN TURKI**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 16 Juli 2020
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pimpinan DPR RI Gedung Nusantara III, Lt. II
Acara	:	1. Diskusi dengan Plt Direktur Eropa III, Ditjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI terkait Hubungan Bilateral Negara Indonesia dan Turki; 2. Lain-lain.
Ketua Rapat	:	Muhammad Farhan (F.PNasdem/ A-364)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Robert Juheng Purba (Kepala Bagian Set. KSB)
Hadir	:	1. 4 orang dari 6 Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Turki; 2. Masni Eriza, Plt Direktur Eropa III, Ditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI; 3. Toary Worang, Kepala Subdit IV, Direktorat Eropa III, Kementerian Luar Negeri RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka oleh Muhammad Farhan (F.PNasdem/ A-364), Ketua GKSB DPR RI–Parlemen Turki pada pukul 10.30 WIB dan dilaksanakan juga secara virtual. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Masni Eriza, Plt Direktur Eropa III, Ditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - a. Jumlah WNI (KBRI Ankara, 2018) terdapat 4.600 orang (1.800 mahasiswa, 2.700 Pekerja Migran Indonesia, 100 Masyarakat Indonesia dan Staf KBRI dan KJRI)
 - b. Hubungan Indonesia dan Turki, dibidang :
 - 1) Politik dan Keamanan.
 - Hubungan Bilateral Indonesia dan Turki semakin solid dengan adanya “adanya ***Joint Declaration Indonesia-Turkey: Towards an Enhanced Partnership in a New World Setting***” pada tahun 2011 di Jakarta.
 - Mekanisme Pertemuan Bilateral (i) Forum Konsultasi Politik Bilateral; ii) Sidang Komisi Bersama Ekonomi – Kerja Sama Teknik (2017) ; iii) *Defence Industry Cooperation Meeting* (2019); iv) *Steering Committee*

Meeting on Agriculture (2016); v) *Join Working Group on Health* (2019); vi) Konsultasi Bilateral RI-Turki mengenai Penanggulangan Terorisme (2017)

- Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Turki, 5-6 Juli 2017 merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Turki ke Indonesia tahun 2011 dan 2015. Salah satu hasil penting adalah *Joint Ministerial Declaration Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)* -> sebagai dasar pelaksanaan perundingan IT-CEPA yang saat pada tahun 2019 memasuki Putaran ke-4
- Pertemuan Presiden RI dan Presiden Turki di sela KTT G-20 di Osaka, 29 Juni 2019 sepakat meluncurkan *High Level Strategic Council (HLSC)* sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik RI-Turki pada saat kunjungan Presiden Turki ke Indonesia mendatang.
- Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Turki, 5-6 Juli 2017 merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Turki ke Indonesia tahun 2011 dan 2015. Salah satu hasil penting adalah *Joint Ministerial Declaration Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*, sebagai dasar pelaksanaan perundingan IT-CEPA yang saat pada tahun 2019 memasuki Putaran ke-4
- Pertemuan Presiden RI dan Presiden Turki di sela KTT G-20 di Osaka, 29 Juni 2019, sepakat meluncurkan *High Level Strategic Council (HLSC)* sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik RI-Turki pada saat kunjungan Presiden Turki ke Indonesia mendatang.

2) Ekonomi dan Perdagangan

- Total nilai perdagangan Indonesia dan Turki pada tahun 2019 mencapai US\$ 1,48 miliar dengan surplus di pihak Indonesia sebesar US\$ 804,39 juta. Namun, nilai ini menurun dibandingkan US\$ 1,79 miliar pada tahun 2018. Penurunan juga tampak hingga April 2020 mencapai 6,8% dari USD 503,6 juta hingga April 2019 menjadi, USD 469,6 juta hingga April tahun 2020.
- Perdagangan RI-Turki pada tahun 2019 USD 1,48 milyar atau mengalami penurunan -16,9%. Sementara ekspor Indonesia tahun 2019 turun sekitar -2,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian surplus Indonesia tahun 2019 mencatat kenaikan 41% dibandingkan tahun sebelumnya.
- Nilai perdagangan Indonesia-Turki masih belum mencerminkan potensi ekonomi kedua negara. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya perjanjian perdagangan bebas yang dapat mengatasi hambatan perdagangan baik *tariff* maupun *non-tariff*, diantaranya dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dalam bagian *Trade in Goods (TIG)*.

3) Ekonomi Investasi

- Selama periode 2017-2019, investasi Turki di Indonesia cenderung meningkat. Nilai investasi Turki ke Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar USD 24,8 juta naik 570% atau 6 kali lipat dibandingkan tahun 2018 sebesar USD 3,7 juta.
- Saat ini, investasi Turki di Indonesia masih kurang dari 1% dari nilai total investasi Turki ke luar negeri (*outbound*) dengan nilai sekitar USD 26 miliar.
- Investasi Indonesia di Turki: keberadaan pabrik Indofood. Dengan berbagai perbaikan iklim investasi ke depannya, diharapkan investasi Turki ke Indonesia akan terus meningkat.

4) Ekonomi Pariwisata

- Jumlah wisatawan Turki ke Indonesia mencatat peningkatan yakni sebanyak 14.867 orang pada 2015 menjadi 20.662 orang pada 2017. Selama periode 2018-2019, jumlah wisatawan asing asal Turki yang berkunjung ke Indonesia menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah wisman Turki ke Indonesia mencapai 23.883 orang naik sebesar 14%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20.861 orang.
- Faktor pendorong -> i) secara aktif berpartisipasi pada pameran pariwisata terbesar di Turki *EMITT* pada awal tahun 2019 dan 2020 disertai *sales mission*; ii) penerbangan *Turkish Airlines* untuk rute Denpasar-Istanbul pada bulan Juli 2019 melengkapi rute yang sebelumnya sudah ada yaitu Jakarta-Istanbul (sejak September 2009).

5) Kerjasama Regional dan Global

- Kerja sama dalam Fora Multilateral-Regional: PBB – OKI – D-8 – G-20 – MIKTA untuk berbagai isu yang menjadi kepentingan Bersama.
- Kegiatan Saling Dukung. Indonesia dan Turki memiliki hubungan yang baik dalam bidang pencalonan pada organisasi internasional (OI). Turki pada Pemerintah RI dan Turki telah memiliki kesepakatan saling dukung antara pencalonan kedua negara sebagai Anggota Dewan HAM tersebut. Turki juga telah mendukung Indonesia pada pencalonan keanggotaan di UNESCO

c. Pengelolaan hubungan bilateral diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kerja sama bilateral ke arah mekanisme *High Level Strategic Council* yang akan diluncurkan saat kunjungan Presiden Turki ke Indonesia.
- 2) Penyelesaian perundingan perdagangan bebas *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*
- 3) Pengembangan kerja sama industri pertahanan, tidak saja joint development, tetapi juga joint marketing diawali dengan produk medium weight tank “Harimau”.

2. M. Husni, SE, MM (F.PGerindra/A-62), Anggota GKSB DPR-Parlemen Turki berpendapat bahwa Indonesia lebih memilih mengirimkan tekstil ke Dubai karena lebih murah dibanding mengirim ke Turki.

3. Zulfikar Hamonangan, SH (F.PD/A-562), Anggota GKSB DPR-Parlemen Turki berpendapat bahwa :

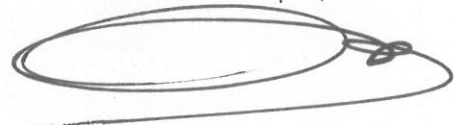
- a. terkait Tenaga Kerja, Turki membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak di bidang infrastruktur. Disarankan mekanisme teknisnya dalam konsep kontraktor.
- b. Investor Turki siap memberikan permodalan kerja dengan membantu pembangunan daerah, khusus perusahaan swasta dan ada mekanisme yang jelas antara di daerah dan pusat.
- c. Terkait pendidikan, generasi di Turki memiliki pola berpikir yang unik dan disiplin yang perlu dipelajari sehingga membangun mental pendidikan di Indonesia.
- d. UMKM, Indonesia belum bisa memberikan kualitas mutu, hal ini berbeda dengan Turki. Bagaimana cara memasarkan katalog/ produk-produk UMKM ke Turki.
- e. Usul Atase Perdagangan diganti namanya dengan Atase Pemasaran diluar negeri yang mempunyai kinerja marketing dengan ada target menjual produk Indonesia dan menjangkau akses/link di dalam negeri, misalnya membuat *playstore* UMKM.

4. H. John Kenedy Azis, SH (F.PG/A-272), Anggota GKSB DPR-Parlemen Turki berpendapat bahwa perlu koordinasi antara DPR RI, Kemenlu dan KBRI di negara yang dituju dikarenakan dalam beberapa kesempatan kunjungan luar negeri, ada kesan sulitnya menerima kunjungan kerja DPR RI, dan konfirmasi jawaban/tanggapan surat yang terlalu lama (1-2 bulan).
5. Masni Eriza, Plt Direktur Eropa III, Ditjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI menanggapi beberapa pertanyaan dan tanggapan dari beberapa Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Turki :
 - a. Perlu peran GKSB DPR RI dalam berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan Parlemen Turki untuk meningkatkan kerja sama bilateral di kedua negara.
 - b. Produk Indonesia yang masuk ke Timur Tengah lebih murah dibanding ke Turki sehingga dapat dipandang lebih kompetitif hal ini menyesuaikan Norma Perdagangan antar negara yang berlaku.
 - c. Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dibidang ketenagakerjaan yang lebih baik lagi dengan Turki.
 - d. Mengenai investor yang masih banyak kendala, perlu koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama terkait mekanisme, Peraturan dan SOP yang jelas.
 - e. Diharapkan dengan diselesaikannya perundingan IT CEPA, maka investasi kedua negara akan meningkat karena adanya payung hukum dan perlindungan yang jelas.
 - f. Perlu meningkatkan mutu produk UMKM yang belum memenuhi standar, Kemlu sudah berperan melalui perwakilan yang ada di luar negeri, Atase perindustrian dan Atase perdagangan melakukan riset secara berkala secara rutin mengenai data, informasi, dan standar mutu yang diharapkan oleh pasar di suatu negara. Perlu sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM.
 - g. Kemenlu memerlukan program yang dapat mendorong peningkatan mutu produk UMKM, juga diupayakan melalui perjanjian perdagangan ekonomi konferensif, sehingga ada saling bantu dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
6. GKSB DPR – Parlemen Turki merancang program kegiatan dalam waktu dekat antara lain :
 - a. dijadwalkan antara tanggal 19-25 Agustus 2020
 - Pertemuan dengan Duta Besar Turki di Jakarta
 - Pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Ankara secara virtual
 - Pertemuan dengan Anggota Parlemen Turki secara virtual dalam kerangka kerjasama bilateral maupun dalam kapasitas sebagai sesama anggota APA dan PUIC.
 - b. dijadwalkan antara tanggal 26-31 Agustus 2020
Sementara untuk pengembangan investasi dan perdagangan dengan Turki, akan diadakan FGD dengan Kepala BKPM, Menteri Perdagangan dan APINDO.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Drs. Robert Juheng Purba
NIP. 196207031992031002